



Pira Pramudita¹
 Andini Utari Putri²
 RM. Rum Hendarmin³

PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BETUNG SELATAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Good Government Governance dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam survey Pada Pemerintahan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 orang yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Tokoh Masyarakat Desa. Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan metode sample jenuh dan di dapat jumlah 54 responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji autokorelasi, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS version 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel good government governance berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, variabel akuntabilitas pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam uji secara parsial. Selanjutnya, Variabel good government governance dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam uji secara simultan berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kemampuan variasi variabel independent mampu mempengaruhi variabel dependent sebesar 87,9% dalam uji koefisien determinasi.

Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Good Government Governance, Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

Abstract

This research aims to determine the influence of Good Government Governance and Village Government Accountability on the Management of Village Fund Allocations in a survey of the South Betung Village Government, Abab District, Pali Regency. The population in this study was 54 people who came from elements of the Village Apparatus, Village Consultative Body, Village Community Empowerment Institution, Family Welfare Development and Village Community Leaders. Sampling in this study used the saturated sample method and a total of 54 respondents were obtained. Data analysis in this research uses validity tests, reliability tests, class assumption tests, multiple regression analysis, autocorrelation tests, hypothesis tests and coefficient of determination tests using the SPSS version 25 program. The results of the research show that good government governance variables influence the management of village fund allocations. The village government accountability variable influences the management of village fund allocation in a partial test. Furthermore, the variable good governance: governance and accountability of village government in the test simultaneously has a positive effect on the management of village fund allocation. The ability of variations in the independent variable is able to influence the dependent variable by 87.9% in the coefficient of determination test.

Keywords: Village Fund Allocation Management, Good Government Governance. Village Government Accountability.

^{1,2,3}Akuntansi, Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri

email: 2020520054@students.uigm.ac.id, andini@uigm.ac.id, hendarmin@uigm.ac.id

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kualitas kinerja pengelolaan dana desa dapat terjadi apabila sistem pemerintahan tertata dengan baik (*good government governance*). Dengan dengan berbagai prinsip dasar dan standar pengelolaan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan serta pelaksanaan yang sesuai tugas dan tanggung jawab pengelola, Dana Desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. *Good governance* dalam sistem administrasi Indonesia diterapkan seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam "Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan" Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, menyebutkan Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka (Lumempow et al., 2021).

Suatu pemerintahan dikatakan baik atau tidak juga ditentukan oleh faktor akuntabilitas dari pemerintah itu sendiri (Fadhlorrohan et al., 2021). Berdasarkan peraturan menteri PNN No. 3 Tahun 2023 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pemerintahan Desa Betung Selatan dalam hal ini terdiri dari kepala Desa dan Perangkat Desa beserta staf dan jajarannya serta lembaga Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lambang Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat yang paling dasar mempunyai tugas untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan masyarakat yang ada di Desa. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut tentunya desa harus mempunyai sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Dalam proses pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang ada di Desa, Desa tentunya mendapatkan bantuan dukungan berupa alokasi dana desa dari pemerintah pusat yang di transfer melalui pemerintah daerah. Selain mendapatkan bantuan alokasi dana desa untuk mampu mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pemerintahan desa juga tentunya harus mengikuti prosedural akuntabilitas yang berlaku guna terwujud nya suatu sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good government governance*) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di desa (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra penelitian yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan desa di Desa Betung Selatan, dalam sistem pengelolaan pemerintahan masih belum maksimal hal tersebut dapat dilihat melalui terlambatnya proses pembayaran gaji, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan BUMDES serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan lembaga desa dalam membangun partisipasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan di Desa seperti dalam musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa. selain itu juga di dapat fenomena minimnya sosialisasi dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan masyarakat Desa.

Selain dari fenomena pengelolaan pemerintahan desa juga di dapat fenomena lain yakni kurangnya keterbukaan dari pemerintahan desa terkait pemberian informasi anggaran pembangunan. Hal demikian dapat dinilai melalui. Beberapa pelaksanaan pembangunan yang ada di desa masih terdapat beberapa bangunan yang dilaksanakan di Desa memiliki keterlambatan dalam pemberian informasi terkait anggaran pembangunan hal ini dapat terlihat

dari terlambatnya proses pemberian informasi kepada masyarakat seperti pemasangan spanduk yang berisi nominal anggaran pada papan anggaran proyek atau bahkan tidak ada sama sekali, kurangnya arsif terkait perencanaan dan laporan pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran di dalam kantor Desa seperti APB Desa dan LKPP Desa. Hal demikian tentunya dinilai belum maksimal dalam proses pertanggung jawaban atau akuntabilitas pemerintah desa dan lembaga desa kepada masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena diatas dan Mengingat pentingnya kemajuan didesa sebagai salah satu faktor kemajuan negara, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Pengaruh Government Governance dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Betung Selatan (Survei Pada Pemerintahan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali)"**.

STUDI KEPUSTAKAAN

Good Government Governance

Good Government Governance adalah bentuk aplikasi dari prinsip-prinsip good governance di bidang perlakuan pemerintahan (government actions) secara luas di semua level (Khusniyah, 2018). Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melindungi dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Apabila prinsip-prinsip good governance tersebut dapat diaplikasikan dengan seimbang, maka organisasi di sektor publik dapat lebih mudah menjalankan pemerintahan serta mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkedudukan lebih tinggi (Hasibuan, 2019).

Akuntabilitas

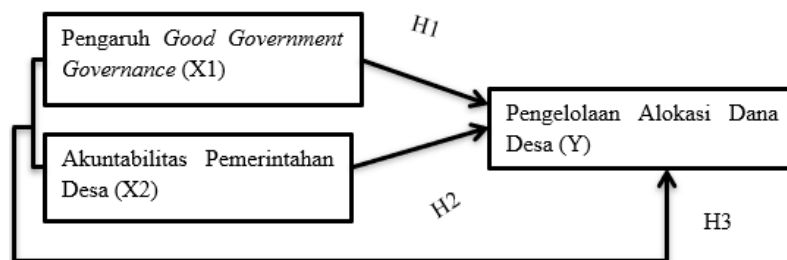
Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah atau dalam hal ini kepala Desa untuk bertanggung jawab atas dana desa yang telah dikelola kepada masyarakat dan pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi (Safitri et al., 2023) Lembaga-lembaga pemerintahan dan para aparatur negara harus dapat memberikan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing (Maryam, 2018).

Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan No 201/ PMK.07/ 2022, maka desa dapat menjalankan otonominya dengan lebih luas dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Mengacu pada peraturan tersebut, setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri.

Alokasi dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk membiayai pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Subhan, 2019).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka-angka dan menguji variabel pengaruh good goverement governance terhadap variabel pengelolaan dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Betung

Selatan melalui metode wawancara, survey dan pengisian kuesioner. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini di dapat melalui penyebaran kuesioner pada Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Toko Masyarakat yang menjadi sample.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh segenap unsur pemerintahan desa di Desa Betung yang berjumlah 54 orang dan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yang diambil dari jumlah keseluruhan pemerintahan desa di Desa Betung Selatan yang berjumlah 54 orang yang diambil dari populasi dan akan dijadikan sampel jenuh dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha (Sanaky et al., 2021). Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Good government governance	0,907	Reliabel
Akuntabilitas Pemerintahan Desa	0,815	Reliabel
Penggunaan Alokasi Dana Desa	0,836	Reliabel

Halsil uji reliabilitalis tersebut menunjukaln balhwal semual valriabel mempunyal koefisien Allphal yang cukup besar yalitu di altals 0,60 sehinggal dalpalt dikaltalkaln semual konsep pengukur malsing-malsing valriabel dalri kuesioner aldallalh reliabel. Untuk selalnjutnyal item-item pdald malsing-malsing konsep valriabel tersebut lalyalk digunalkaln sebalgali allalt ukur.

Uji Multikolinearitas

Pengujialn Multikolinealritals bertujualn untuk mengetalhui hubungaln yang sempurnal alntalr valriabel bebals dallalm mode regresi (Indanazulfa, 2022). Gejallal multikolinealritals dalpalt dilihalt dalri nilali toleralnce daln nilali Valrialn Inflation falctor (VIF). Alpalbilal nilali VIF beraldal < 10.00 daln nilali toleralnce di > 0,10 malkal dialmbil kesimpulaln balhwal model regresi tersebut tidalk terdalpalt problem multikolinealritals.

Tabel 2. Hasil Uij Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Good Government Governance	,969	1,031
	Akuntabilitas Pemerintahan Desa	,969	1,031

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalri halsil uji multikoliniealritals dialtals dalpalt diketalhui nilali inflation falctor (VIF) kedual valriabel, yalitu pengalruh good government governance sebesarr 1,031 daln akuntabilitas pemerintahan desa sebesarr 1,031 lebih kecil dalri 10.00 daln nilali toleralnsi dalri valriabel good government governance sebesarr 0,969 daln akuntabilitas pemerintahan desa sebesarr 0,969 lebih besar dalri 0,1 sehinggal dalpalt disimpulaln balhwal alntalr valriabel independen tidalk terjaldi persoallaln multikolinealritals.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujualn untuk menguji alpalkalh dallalm sebualh model regresi terjaldi ketidalksalmalaln valrialns dalri residuall, dalri sualtu pengalmlaltaln ke pengalwalsaln yang lalin (Purba, 2023). Jikal valrialns dalri residuall sualtu pengalmlaltaln ke pengalmlaltaln yang lalin tetalp, malkal disebut homokedalstisitals. Model regresi yang balik aldallalh tidalk terjaldi heteroskedalstisitals.

Pada pembahasannya ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser, yaitu mengkolerasi nilai absolut residual dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikan lebih dari 0,05, maka pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	1,000
	Good Government Governance	1,000
	Akuntabilitas Pemerintahan Desa	1,000
a. Dependent Variable: RES2		

Berdasarkan output di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan variabel pengaruh good government governance (X1) sebesar 0,158 lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikan variabel akuntabilitas pemerintah desa (X2) sebesar 1,000 lebih besar dari 0,05. Maka pada variabel regresi ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dan model regresi dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen yaitu pengaruh good government governance dan akuntabilitas pemerintahan desa terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau homoskedastisitas, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas antara variabel independen, sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara dalam hal variabel independen (Tampubolon & Ariadi, 2023). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin Watson (DW test). Adapun cara mendeteksi terjadinya autokorelasi secara umum dapat diambil sebagai berikut :

- a. Angka DW Dibawah – 4 berarti ada Autokorelasi
- b. Angka DW diantara -4 Sampai 4 berarti Tidak terdapat Autokorelasi.
- c. Angka DW di atas 4 berarti ada Autokorelasi Negatif.

Tabel 4. Hasil Uji Auto Korelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.594
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas pemerintahan desa, Good government governance	
b. Dependent Variable: Pengelolaan alokasi dana desa	

Berdasarkan tabel di atas, nilai DW dapat diketahui sebesar 1,594, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel DW signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 54 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k = 2), maka diperoleh nilai du sebesar 1,6383, dan nilai DW sebesar 1,594 lebih kecil dari batas atas (du) yakni 1,6383 dan kurang dari (4-du) atau 4 - 1,6383 = 2,3617. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah data pada variabel distribusi normal atau tidak. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka metode alternatif yang bisa digunakan adalah statistik nonparametrik. Dalam pembahasannya ini digunakan uji one sample kolmogorov-smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual

N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.94380102
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.061
	Negative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.036 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dalri hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,092 kurang signifikan untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel good government governance dan akuntabilitas pemerintahan desa berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas maka dapat disimpulkan bahwa semua data berdistribusi secara normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas. Hal ini berarti variabel independen yaitu pengaruh good government governance dan akuntabilitas pemerintahan desa berdistribusi normal, sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data harus bebas dari gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Yaldi, 2023). Dari analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS versi 25.0 diperoleh hasil seperti tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	31.865	7.026
	Good government governance	.151	.106
	Akuntabilitas pemerintahan desa	.090	.266

a. Dependent Variable: Pengelolaan alokasi dana desa

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang disajikan pada Tabel 4.9 diperoleh variabel bebas $X_1 = 0,151$ $X_2 = 0,090$ dan konstanta sebesar 31,865 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 31,865 + 0,151X_1 + 0,090X_2$$

- Y = Variabel dependen (Pengelolaan alokasi dana desa)
- X_1 = Variabel independent (Good government governance)
- X_2 = Variabel independent (Akuntabilitas pemerintahan desa)

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Nilai sebesar 31,865 adalah konstanta, artinya tanpa ada pengaruh dari variabel kedua variabel independen, maka variabel laba pengelolaan alokasi dana desa mempunyai nilai sebesar konstanta tersebut yaitu 31,865.
- b. Koefisien regresi 0,151 menyatakan bahwa good government governance akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 15,1% tanpa dipengaruhi faktor lain.
- c. Koefisien regresi 0,090 menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa sebesar 9,0% tanpa dipengaruhi faktor lain.

Uji Analisis Korelasi

Ukuran yang menyatakan kekuatan hubungan tersebut adalah koefisien korelasi atau sering disebut dengan korelasi person (pearson product moment) (Somantri et al., 2024). Hasil uji analisis korelasi disajikan pada tabel 7:

Tabel 7. Hasil Analisis Korelasi

Correlations		Good government governance	Akuntabilitas pemerintahan desa	Pengelolaan alokasi dana desa	Keterangan
Good government governance	Pearson Correlation	1	.175**	.207**	Terdapat Hubungan Kuat
	Sig. (1-tailed)		.103	.278	
	N	54	54	54	
Akuntabilitas pemerintahan desa	Pearson Correlation	.175**	1	.082**	Terdapat Hubungan Sangat Kuat
	Sig. (1-tailed)	.103		.278	
	N	54	54	54	
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Berdasarkan Tabel 7 di atas diperoleh nilai sig.0.278 > 0,05 artinya terdapat hubungan antara good government governance dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam angka pearson correlation (r) sebesar 0,207 dalam derajat hubungan kuat karena berada di antara 0,60-0,799. dapat disimpulkan bahwa good government governance bahwa berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dalam variabel akuntabilitas pemerintahan desa diperoleh angka sig.0.278 > 0.05 artinya terdapat hubungan antara variabel akuntabilitas pemerintahan desa dengan variabel pengelolaan alokasi dana desa dengan derajat hubungan sangat kuat karena diperoleh nilai pearson correlation (r) sebesar 0,082 dengan derajat hubungan sangat kuat karena berada antara 0,80-1.00 dengan arah hubungan positif.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R square sebagai mana dapat dilihat pada tabel 8:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Keterangan
1	.008	6.059	Berpengaruh 0,08 %

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R²) yang diperoleh sebesar 0,008. Hal ini berarti 0,08 % variabel pengelolaan alokasi dana desa dipengaruhi oleh variabel good government governance dan akuntabilitas pemerintahan desa, sedangkan jumlah sisanya 99,95% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t (parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel good government governance (X1) dan akuntabilitas (X2) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y) membandingkan t hitung dengan t tabel atau melihat nilai signifikansi hasil output SPSS pada alpha 0,05 (5%). Adapun hasil pengujian t adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
No	Model	T _{hitung}	T _{tabel}	Nilai Sig.	Keterangan
1	Good government governance	2,216	0,679	0,035	berpengaruh positif
2	Akuntabilitas pemerintahan desa	5,182	0,679	0,000	berpengaruh positif

Berdasarkan tabel 9 nilai t hitung untuk variabel good government governance sebesar 2,216 dan t hitung untuk variabel akuntabilitas pemerintahan desa sebesar 5,182 untuk mengetahui pengaruh good government governance dan akuntabilitas pemerintahan desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa secara parsial dengan melakukan pembandingan nilai t hitung dengan t tabel, Apabila t_{hitung} > t_{tabel}, maka hipotesis dinyatakan diterima. Untuk mengetahui nilai t tabel, maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut : $Df = n - k - 1$, dimana n merupakan total sampel, k adalah jumlah variabel independen. Jadi $df = 54 - 2 - 1 = 51$. Jadi dapat kita lihat pada tabel t pada df 51 didapat nilai sebesar = 0,679

Perbandingan t hitung dengan t tabel, yakni perbandingan t hitung dengan t tabel untuk variabel good government governance dapat kita lihat bahwa nilai t hitung dan t tabel, yakni $2,216 > 0,679$ t_{hitung} > t_{tabel} maka H_0 ditolak dan untuk variabel akuntabilitas pemerintahan desa didapat nilai $5,186 < 0,679$ t_{hitung} > t_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_0 diterima. Jadi berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen memiliki pengaruh positif dalam uji secara parsial terhadap variabel dependent. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hipotesis yang menyatakan H_2 : good government governance berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah Diterima
2. Hipotesis yang menyatakan H_3 : akuntabilitas pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah diterima

Uji F (Simultan)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersamaan diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a			
Sig.	F _{Hitung}	F _{Tabel}	Keterangan
.000	39,600	4,02	berpengaruh positif

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji f. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F_{hitung} = 39,600 dengan menggunakan batas sig 0,05, maka diperoleh nilai F_{hitung} $39,600 < F_{tabel}$ dari 4,02. Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dan nilai sig. $0,000 > 0,05$ dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel good government governance dan variabel akuntabilitas pemerintahan desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini berarti bahwa :

1. Hipotesis yang menyatakan H_1 : good government governance dan akuntabilitas pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah diterima.

Pengaruh Good Government Governance dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut penelitian di atas, dinyatakan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel good government governance dan akuntabilitas dalam uji secara uji F (simultan) berpengaruh secara positif dan signifikan. Hal ini dapat disimpulkan dengan membandingkan nilai f_{hitung} $39,600 < f_{tabel} 4,02$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel good government governance dan variabel akuntabilitas pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Betung Selatan kedua yaitu, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara good government governance terhadap pengelolaan

alokasi dana desa (X1), hipotesis yang ketiga terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas pemerintahan desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa (X2).

Good Government Governance Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil uji t di dapat nilai thitung 2,216 dan ttabel 0,679 artinya di dapat nilai thitung > ttabel dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel good government governance berpengaruh terhadap variabel pengelolaan alokasi dana desa. Adanya pengaruh dari sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) dapat menjadi salah satu penyebab kepatuhan suatu organisasi kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini memiliki pengaruh dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tanpa adanya kepatuhan terhadap pemerintahan akan berakibat pada tidak tepat sarannya pengelolaan alokasi dana desa dan akan berakibat pada terhambatnya pembangunan di berbagai sektor yang akan ada pengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di desa.

Akuntabilitas Pemerintahan Desa Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam penelitian ini Analisis Pengaruh akuntabilitas pemerintahan desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa variabel akuntabilitas pemerintahan desa berpengaruh positif dalam uji secara parsial. Hal ini dapat disimpulkan karena nilai sig. $0,000 < 0,05$. Dan nilai thitung > ttabel ($5,182 > 0,679$). Hal ini selaras dengan teori kepatuhan. Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku (Wijayanti et al., 2022)

Adanya suatu konsep kepatuhan di dalam sebuah organisasi pemerintahan berupa dalam pengadministrasian dan laporan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Akan berakibat pada pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dapat terjadi karena adanya asas-asas yang saling berkaitan antara asas satu dengan asas lain (Kurniawati, 2019).

Dengan demikian, apabila tidak terpenuhinya salah satu asas aturan dasar dalam pengelolaan alokasi dana desa berupa akuntabilitas dari pemerintahan desa yang dalam hal ini merupakan pihak pengelola sekaligus pihak penanggung jawab akan memiliki pengaruh pada proses pengelolaan alokasi dana desa, seperti terjadi pembangunan yang tidak tepat sasaran, penyelewangan dan lain sebagainya atau perilaku yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal demikian tentunya akan berakibat pada terhambat dan terlambatnya proses pengelolaan alokasi dana desa yang akan berpengaruh pada kesejahteraan hidup masyarakat desa (Kurniawati, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan rumus di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Good government governance dan akuntabilitas pemerintahan desa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Betung Selatan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian serta teori kepatuhan, yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan berkontribusi pada efektivitas pengelolaan dana desa. Lebih lanjut, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab oleh pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2. Good government governance menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang didukung oleh nilai thitung yang lebih besar dari ttabel. Teori kepatuhan juga menguatkan konsep ini, dengan organisasi cenderung mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintahan yang dianggap memiliki otoritas. Adanya kepatuhan terhadap pemerintah yang lebih tinggi juga menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan alokasi dana desa yang tepat sasaran dan efektif di berbagai sektor, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
3. Akuntabilitas pemerintahan desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini sejalan dengan konsep kepatuhan di organisasi pemerintahan, yang mempengaruhi pelaporan pertanggungjawaban terhadap alokasi dana desa. Ketidakepatuhan terhadap asas-asas dasar dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai target serta perilaku yang tidak

bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses pengelolaan alokasi dana desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

4. Peningkatan baik dalam good government governance maupun akuntabilitas pemerintahan desa akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Betung Selatan.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, yang menyimpulkan bahwa teori-teori tersebut malapetaka sekalipun bersifat uraian yang telah dikemukakan, maka diberikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintahan Desa Betung Selatan :

1. Bagi Pemerintahan Desa Betung Selatan, dapat menjadi tambahan informasi bahwa variabel good government governance dan akuntabilitas pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian, diharapkan kedepannya dapat lebih memaksimalkan lagi sistem tata kelola pemerintahan (good government governance) agar dapat lebih menambah kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat yang ada di Desa Betung Selatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Kepada peneliti selanjutnya hendaklah menambahkan variabel lain untuk memperkuat penelitian seperti: Legitimasi Politik, Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhlorrohmah, M. I., Budiman, & Khairina, E. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi KOMPARATIF Pemerintah Kabupaten Bantul DAN Kabupaten Sleman). *Jurnal Moderat*, 7(2).
- Hasibuan, B. R. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah). Universitas Medan Area.
- Indanazulfa. (2022). Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Pasien Dengan Pemanfaatan Layanan Bpjs Di Klinik Pratama Bagus Samudra. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Khusniyah, I. (2018). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Universitas Islam Indonesia.
- Kurniawati, Y. (2019). Akuntabilitas DAN Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa DALAM Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Universitas Semarang.
- Lumempow, V., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (Studi Di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jap*, 7(103).
- Maryam, N. S. (2018). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*.
- Purba, T. A. (2023). Pengaruh Organizational Citizenship Behavior , Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pelabuhan Indonesia Regional 1 Medan. Universitas Medan Area.
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 24–33. [HTTPS://DOI.ORG/10.33701/JIPWP.V47I1.1531](https://doi.org/10.33701/JIPWP.V47I1.1531)
- Safitri, A. E., Pramomo, J., & Istiyani, A. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. In *Jurnal Imagine* (Vol. 3, Issue 1). Online. [HTTPS://JURNAL.STD-BALI.AC.ID/INDEX.PHP/IMAGINE](https://jurnal.std-bali.ac.id/index.php/imagine)
- Sanaky, M. M., Saleh, L. Moh., & Titaley, H. D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah. *Jurnal Simetrik*.

- Somantri, I. F., Rohaeni, H., Maulia, I. R., & Jumawan, J. (2024). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Etos Kerja Karyawan Pada Pt Asr. Senti: Jurnal Riset Ilmiah, 3(3), 1684–1694. [HTTPS://DOI.ORG/10.55681/SENTRI.V3I3.2443](https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2443)
- Subhan. (2019). Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap, Kabupatentebo). Ijieb: Indonesian Journal OF Islamic Economics AND Business, 4(1).
- Treza Tampubolon, L., & Ariadi, W. (2023). Pengaruh Belanja Modal DAN Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15(1), 25–31. [HTTPS://DOI.ORG/10.55049/JEB.V15I1.151](https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.151)
- Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-FAKTOR YANG Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, 9(3), 15–28. [HTTPS://DOI.ORG/10.55963/JRAA.V9I3.485](https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485)
- Yaldi. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Indri Plant Pks Napal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim